

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

7

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
						✓							

Rekomendasi BPK Perbaiki Kelola Kebijakan Fiskal

Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat dari hasil pemeriksaan LKPP 2020 merupakan pencapaian yang baik di tahun yang berat.

DIAN WAHYU KUSUMA

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh menteri, pemimpin lembaga, dan kepala daerah segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas temuan di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020. Temuan itu tertuang di Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020.

"Saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga, dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan," ujar Jokowi saat memberikan pengarahannya dalam penyampaian LHP LKPP dan IHPS II serta Penyerahan LHP Semester II Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/6).

Kepala Negara menekankan pe-nindaklanjutan rekomendasi harus dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas LKPP, terutama ketika Indonesia masih berada di tengah kondisi sulit akibat pandemi Covid-19.

Menurutnya, hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK sangat men-

dukung perbaikan pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal.

"Khususnya, terkait pengelolaan pembiayaan APBN, defisit anggaran, memulihkan ekonomi, dan menjaga keuangan negara agar tetap kredibel dan terukur di saat pandemi," ujar Jokowi.



Kita harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat.

Jangan Puas

Jokowi juga meminta para menteri, pemimpin lembaga, dan kepala daerah untuk tidak berpuas diri dengan hasil opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat

dari hasil pemeriksaan LKPP 2020.

WTP, ujar Presiden, memang merupakan pencapaian yang baik di tahun yang berat, namun itu bukanlah sebuah tujuan akhir.

Karena memang sudah semestinya Pemerintah Pusat hingga daerah memastikan pengelolaan LKPP dengan sebaik-baiknya, transparan, akuntabel, berkualitas, dan tepat sasaran.

Ia pun mengapresiasi kepada BPK yang di tengah berbagai keterbatasan aktivitas dan mobilitas di masa pandemi telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP tahun 2020 dengan tepat waktu.

"Kita harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat," ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan pemerintah akan sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan *counter cyclical* dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi dikelola secara hati-hati, kredibel, dan terukur. (M/R4)